



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 10 / KPTS / 2025

TENTANG

REKOMENDASI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TERHADAP PERATURAN DAERAH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025 TRIWULAN III

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Pasal 4 huruf c Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa pembahasan hasil pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul terhadap Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Triwulan III telah menghasilkan rekomendasi yang perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Rekomendasi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul terhadap Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Triwulan III;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025;
 5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG REKOMENDASI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TERHADAP PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 TRIWULAN III.
- KESATU : Rekomendasi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul terhadap Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Triwulan III sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada Bupati sebagai rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintah Daerah ke depan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosari
Pada tanggal : 17 Oktober 2025

KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,



ENDANG SRI SUMIYARTINI

Tembusan :
Gubernur D.I. Yogyakarta sebagai laporan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 10 /KPTS/2025 TENTANG REKOMENDASI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 TRIWULAN III

Kabupaten Gunungkidul dihadapkan pada tantangan domestik, serta dinamika kebijakan nasional di Tahun 2025. Fokus masyarakat dan pemerintah tertuju pada transisi kepemimpinan, dan penyesuaian kebijakan. Hal ini dapat menimbulkan dinamika penyelenggaraan anggaran dan pelaksanaan program kegiatan yang dapat berdampak pada kinerja pelayanan publik kepada masyarakat. Tema Pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 yang mengusung “Penguatan Ekonomi Daerah, Taraf Hidup Masyarakat, Infrastruktur, dan Peningkatan SDM yang Unggul” dengan prioritas pembangunan sebagai berikut, Peningkatan Ekonomi; Angka Kemiskinan, Kemiskinan Ekstrim, dan Penanganan Stunting; Ketahanan Pangan; Peningkatan Kualitas SDM; Infrastruktur, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana; Ketentraman dan Ketertiban, dan Reformasi Birokrasi, harus menjadi agenda utama dan prioritas pengawasan kinerja pemerintah daerah karena menjadi kebijakan utama dalam pelaksanaan APBD dan pembangunan daerah Tahun Anggaran 2025.

Realisasi anggaran pada Triwulan III menjadi tolok ukur penting dalam menilai kinerja pelaksanaan APBD serta menjadi peringatan dini terhadap efektivitas program pada triwulan berikutnya. Pada kesempatan ini, DPRD Kabupaten Gunungkidul menekankan agar serapan anggaran tidak hanya tinggi secara nominal, tetapi juga sejalan dengan capaian kinerja yang terukur dan berdampak nyata bagi masyarakat. Melalui fungsi pengawasan, DPRD memastikan APBD Tahun Anggaran 2025 benar-benar berfungsi sebagai instrumen kebijakan yang mendorong percepatan pembangunan daerah. Untuk itu, DPRD mendorong pemerintah daerah mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan prioritas, khususnya yang berhubungan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, serta penguatan ekonomi masyarakat. Selain itu, DPRD juga menegaskan pentingnya percepatan realisasi proyek-proyek strategis daerah, seperti pembangunan infrastruktur dan pengadaan barang/jasa, agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat dan mampu meningkatkan daya dukung sarana-prasarana pelayanan publik yang hingga saat ini masih belum optimal.

Berikut isu/permasalahan/hasil pengawasan Kinerja OPD pada masing-masing komisi :

No	OPD	No	Permasalahan	No	Rekomendasi
1.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.	Meningkatnya sensitivitas masyarakat terhadap kegiatan organisasi kemasyarakatan (ormas) menuntut langkah deteksi dini dan pembinaan yang efektif untuk menjaga stabilitas sosial dan keamanan daerah.	1a	Perlu meningkatkan literasi masyarakat terhadap peran dan fungsi ormas melalui kegiatan dialog publik, kampanye damai, dan edukasi di media sosial agar masyarakat memahami perbedaan pendapat sebagai bagian dari demokrasi, bukan sumber konflik.
				1b	Meningkatkan program pembinaan ormas secara berkelanjutan, melalui pelatihan manajemen organisasi, peningkatan wawasan kebangsaan, dan sosialisasi nilai-nilai toleransi serta moderasi beragama guna mendorong ormas berperan positif dalam pembangunan daerah.
				1c	Mendorong Kesbangpol untuk mekanisme deteksi dini dan koordinasi lintas sektor, dengan membentuk forum komunikasi rutin antara Kesbangpol, aparat keamanan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk memantau aktivitas ormas serta merespons cepat potensi gesekan sosial.
2.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.	Penegakan Perda belum berjalan masif dan menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.	1a	Mendorong Satpol PP untuk meningkatkan intensitas dan konsistensi penegakan Perda secara terukur dan transparan agar masyarakat memahami tujuan penegakan hukum sebagai upaya menjaga ketertiban, bukan semata tindakan represif.
				1b	Mendorong pendekatan persuasif dan edukatif dalam setiap kegiatan penertiban, dengan melibatkan tokoh masyarakat dan perangkat kalurahan untuk memperkuat legitimasi dan penerimaan publik.
		2.	Sarana operasional seperti jetski pengawasan wisata memerlukan perhatian dalam pemeliharaan dan koordinasi pengelolaannya.	2a	Pemerintah daerah mendorong peningkatan anggaran dan jadwal pemeliharaan rutin sarana operasional wisata seperti jetski agar selalu siap digunakan dalam pengawasan dan penanganan kondisi darurat di kawasan pantai.
				2b	Mendorong penguatan koordinasi antara Satpol PP, Dinas Pariwisata, dan instansi terkait untuk memastikan pemanfaatan jetski dan fasilitas pengawasan lainnya berjalan optimal dan terpadu.
3.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.	Kabupaten Gunungkidul memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai jenis bencana seperti tanah longsor, gelombang tinggi, dan angin kencang.	1a	Pemerintah daerah mendorong penguatan sistem mitigasi bencana berbasis wilayah, dengan memetakan zona rawan dan memperbarui data kerentanan secara berkala sebagai dasar perencanaan pembangunan yang berketahanan bencana.

				1b	Mendorong optimalisasi peran kelurahan tangguh bencana (Katana) dan TRC Kapanewon dalam membangun kesiapsiagaan komunitas melalui pelatihan, simulasi, serta penyediaan sarana darurat yang memadai.
		2.	Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana masih kurang	1a	Pemerintah daerah mendorong peningkatan frekuensi dan kualitas sosialisasi kebencanaan dengan pendekatan edukatif di sekolah, kelompok tani, karang taruna, dan masyarakat umum agar pemahaman terhadap risiko bencana semakin luas.
				1b	Mendorong kolaborasi antara BPBD, tokoh masyarakat, dan relawan lokal dalam membentuk jaringan informasi bencana yang responsif di tingkat kalurahan sehingga penanganan darurat dapat dilakukan lebih cepat dan tepat.
4.	BKPPD	1.	Keberlanjutan tenaga P3K paruh waktu dan tenaga non-ASN yang sudah lama bekerja belum terjamin sepenuhnya.	1a	Mendorong pemerintah daerah untuk memprioritaskan tenaga non-ASN yang telah bekerja lebih dari dua tahun dan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan OPD dalam formasi pengangkatan P3K, guna menjaga kontinuitas pelayanan publik.
				1b	Mendorong BKPPD melakukan pemetaan kebutuhan riil tenaga kerja di setiap OPD, agar kebijakan pengangkatan P3K lebih berbasis kebutuhan dan tidak menambah beban anggaran tanpa alasan fungsional yang jelas.
				1c	Mendorong peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat (KemenPAN-RB dan BKN) untuk memperjuangkan kebijakan afirmatif bagi tenaga non-ASN daerah yang telah lama mengabdikan namun belum terakomodasi dalam seleksi P3K.
5.	DINAS PENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.	Pelaksanaan percepatan kegiatan pada Triwulan depan atau triwulan IV berpotensi menumpuk di akhir tahun dan memengaruhi efektivitas realisasi anggaran.	1a	Pemerintah daerah mendorong optimalisasi pelaksanaan kegiatan prioritas di awal Triwulan IV melalui penjadwalan yang lebih rinci dan pemantauan mingguan agar tidak terjadi penumpukan kegiatan menjelang akhir tahun.
				1b	Mendorong penguatan fungsi monitoring dan evaluasi internal Disdukcapil, khususnya terhadap kegiatan lapangan seperti <i>Dukcapil Goes to School</i> dan pemeliharaan sarpras, agar progres dan serapan anggaran dapat dikendalikan sesuai target waktu.
				1c	Mendorong percepatan proses administrasi dan pelaporan kegiatan agar tidak terjadi keterlambatan pencairan dan penutupan kegiatan, termasuk dalam penyusunan dokumen pertanggungjawaban di akhir tahun anggaran.

		2.	Masih terdapat sisa anggaran yang tidak dapat direalisasikan serta kegiatan PBJ (pengadaan barang/jasa) yang pembayarannya terjadwal di bulan Desember.	2a	Pemerintah daerah mendorong evaluasi perencanaan anggaran pada tahap awal tahun berikutnya, agar kegiatan dengan karakteristik pembayaran akhir seperti jasa kebersihan dapat diantisipasi sejak awal dalam rencana kas dan jadwal Pengadaan Barang dan Jasa
				2b	Mendorong peningkatan koordinasi antara Disdukcapil, BPKAD, dan bagian Pengadaan Barang dan jasa untuk menghindari keterlambatan pencairan, terutama bagi kegiatan yang bersifat rutin dan berulang setiap tahun.
6.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.	Efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kominfo masih menghadapi tantangan pada aspek kapasitas SDM, sinkronisasi data antar-OPD, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi dan sarana pendukung.	1a	Mendorong peningkatan kapasitas dan sertifikasi SDM pengelola TIK dan komunikasi publik, melalui pelatihan berjenjang, kerja sama dengan perguruan tinggi, dan bimbingan teknis nasional agar mampu mengikuti perkembangan teknologi digital dan keamanan siber.
				1b	Mendorong percepatan integrasi data antar-OPD melalui optimalisasi SPBE dan pemanfaatan pusat data terpadu, sehingga proses layanan publik berbasis digital dapat berjalan efisien dan akurat.
				1c	Mendorong penguatan tata kelola komunikasi publik daerah dengan memperluas jaringan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), memanfaatkan media sosial secara strategis, serta meningkatkan frekuensi evaluasi efektivitas publikasi pemerintah.
7.	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	1.	Deviasi yang signifikan dalam realisasi anggaran total, terutama rendahnya serapan pada Belanja Modal dan Dana Keistimewaan, yang berpotensi menghambat penyelesaian program prioritas.	1a	Mendorong identifikasi dan percepatan kontrak kegiatan, khususnya pada Belanja Modal dan pos anggaran yang bersumber dari Dana Keistimewaan, yang belum terealisasi.
				1b	Mengintensifkan fungsi monitoring dan evaluasi internal secara berkala terhadap realisasi anggaran, dengan fokus pada program yang penyempurnaan keuangannya di bawah rata-rata Triwulan III.
		2.	Keterlambatan Persetujuan Substansi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di tingkat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN akibat proses revisi yang masih berproses dan keterbatasan kuota asistensi.	2a	Melakukan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan Kementerian ATR/BPN untuk mempercepat proses revisi dan memperoleh Persetujuan Substansi RDTR.
				2b	Mendorong penjadwalan asistensi teknis yang lebih terstruktur dan proaktif untuk memantau progres revisi dokumen di Kementerian guna mengatasi keterbatasan kuota asistensi.

		3.	Kompleksitas penyelesaian sengketa tanah garapan akibat perbedaan kepentingan antarpihak yang bersengketa dan keterbatasan regulasi teknis terkait tukar menukar tanah.	3a	Mengintensifkan fasilitasi dialog dan negosiasi antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mencari titik temu dan mempercepat proses mediasi.
				3b	Mendorong kajian regulasi teknis yang lebih mendalam mengenai mekanisme tukar menukar tanah untuk mengatasi keterbatasan payung hukum yang menjadi penghambat.
8.	INSPEKTORAT DAERAH	1.	Terdapat deviasi yang signifikan antara realisasi serapan anggaran dengan target yang telah direncanakan pada Triwulan III.	1	Mendorong akselerasi pelaksanaan program dan kegiatan yang memiliki deviasi realisasi anggaran tertinggi, dengan fokus pada upaya pencapaian target secara maksimal di Triwulan IV.
		2.	Adanya dinamika perubahan regulasi terkait pengawasan dan proses administrasi yang kompleks (penghapusan aset) yang memengaruhi kelancaran pelaksanaan tugas dan pembangunan infrastruktur kantor.	2	Mendorong penyusunan mekanisme adaptasi cepat terhadap perubahan regulasi (seperti terkait saberpungli dan tim pengawas perizinan) melalui sosialisasi internal dan penyesuaian prosedur kerja.
9.	SEKRETARIAT DPRD	1.	Terdapat deviasi yang signifikan antara realisasi anggaran dengan target yang direncanakan hingga akhir Triwulan III, khususnya pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.	1a	Mendorong Sekretariat DPRD untuk mengintensifkan koordinasi dan komunikasi dengan pimpinan dan anggota DPRD agar dalam pelaksanaan tugas, khususnya kunjungan kerja, dapat menggunakan anggaran penginapan secara optimal.
				1b	Mendorong evaluasi mendalam terhadap kegiatan yang memiliki deviasi tinggi, seperti perjalanan dinas, untuk mengidentifikasi solusi agar penyerapan anggaran mendekati target.
		2.	Terdapat beberapa pengadaan barang dan jasa pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mengalami kemunduran atau perubahan metode pengadaan.	2a	Mendorong percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang tertunda, seperti sarpras gedung dan pemeliharaan rumah dinas, agar dapat diselesaikan sebelum akhir tahun anggaran.
				2b	Mendorong Sekretariat DPRD untuk melakukan perencanaan pengadaan yang lebih matang di tahun berikutnya untuk menghindari kemunduran pelaksanaan akibat efisiensi atau perubahan metode.
		3.	Realisasi kegiatan Bimtek/Pendalaman Tugas DPRD masih belum optimal karena adanya beberapa partai politik yang baru melaksanakan Bimtek satu kali.	3a	Mendorong partai politik yang bersangkutan untuk segera menjadwalkan dan melaksanakan sisa target Bimtek/Pendalaman Tugas agar anggaran terserap dan tujuan peningkatan kapasitas tercapai.
				3b	Mendorong Sekretariat DPRD untuk melakukan komunikasi intensif dengan fraksi-fraksi terkait agar kegiatan Bimtek dapat terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan.

10.	DPMKP2KB	1.	Terdapat deviasi yang signifikan antara realisasi keuangan dengan target yang direncanakan hingga akhir Triwulan III.	1a	Mendorong DPMKP2KB untuk mengidentifikasi secara rinci program dan kegiatan yang menjadi penyebab selisih kurang dari target realisasi keuangan dan fisik.
				1b	Mendorong penguatan fungsi monitoring dan evaluasi internal terhadap kegiatan yang serapannya rendah untuk mengantisipasi penumpukan kegiatan di akhir tahun anggaran.
		2.	Capaian realisasi fisik yang belum sepenuhnya memenuhi target perencanaan.	2a	Mendorong DPMKP2KB untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan agar target Triwulan IV dapat tercapai, terutama untuk kegiatan yang baru terealisasi sebagian (seperti peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan kalurahan yang baru 83%)
				2b	Mendorong percepatan proses administrasi dan pelaporan kegiatan agar tidak terjadi keterlambatan pencairan dan penutupan kegiatan.
		3.	Proses penyelesaian kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan kalurahan yang masih berlanjut ke Triwulan IV.	3a	Memastikan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan kalurahan dapat diselesaikan sepenuhnya pada Triwulan IV.
				3b	Mendorong pemanfaatan hasil kegiatan peningkatan kapasitas aparatur untuk memperkuat kualitas pelayanan publik di tingkat Kalurahan.
		4.	Adanya perubahan alokasi anggaran dan penambahan kegiatan yang memerlukan optimalisasi pemanfaatan sumber daya.	4a	Mendorong optimalisasi penggunaan tambahan anggaran untuk mendukung kegiatan yang mendapat penambahan, serta memastikan target dan manfaat kegiatan tersebut tercapai secara maksimal.
				4b	Mendorong peningkatan koordinasi internal untuk memastikan perubahan alokasi anggaran telah diakomodasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara efektif.
11.	BKAD	1.	Hingga pada bulan oktober Realisasi Pendapatan BKAD berasal dari retribusi aset telah tercapai sebesar 66,52% atau sebesar 518.614.900 jt.	1a	DPRD mendorong Intensifikasi pada penarikan retribusi perlu dilakukan terutama.
				1b	DPRD Menghimbau Sebagai upaya dalam peningkatan pendapatan daerah, perlu dilakuakn ekstensifikasi pada objek objek pajak yang kian hari kian meningkat
		2.	Piutang PBBP2 baru tertagih sebesar 1.5 M	2.	DPRD merekomendasikan dalam upaya penagihan piutang pajak disarankan untuk optimalisasi Lurah dan Panewu kemudian dibarengi dengan SE bupati terkait lunas tidaknya PBBP2 tanggung jawab Lurah.
12.	DINAS PETERNAKAN DAM KESEHATAN HEWAN	1.	Beberapa retribusi yang masih perlu dioptimalkan seperti Retribusi IB yang baru tercapai 42%, Retribusi SKKH yang mecapai 63%	1.	Perlu diupayakan agar proses IB bisa dimulai dari awal tahun, sehingga pendapatan dari IB dapat tercapai secara optimal.

		2.	Minimnya pengetahuan masyarakat terkait kompensasi ternak yang mengalami kematian dan masih tingginya masyarakat yang menjual hewan ternak yang terjangkit penyakit dan mengalami kematian.	1.	Sosialisasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pemberian Kompensasi Dan/Atau Bantuan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular Dan Tata Cara Pemberian Kompensasi Hewan Sehat Akibat Depopulasi,
		1.	Keterbatasan lahan pembenihan yang dimiliki DPP. Namun meskipun dengan keterbatasan	1.	Perlu penambahan lahan untuk pembenihan yang memenuhi persyaratan ada sistem pengairan yang memadai.
13.	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		lahan Pendapatan pada DPP hingga bulan oktober sudah melebihi target yaitu sudah mencapai 161 Juta ini berasal dari penjualan benih padi segreng		
		2.	Adanya potensi peningkatan pendapatan melalui peningkatan kapasitas bibit padi segreng. Akan tetapi terhambat tanah produksi yang hanya 1 Ha	1.	Pemanfaatan lahan tidak produktif guna peningkatan pendapatan daerah baik dikelola secara mandiri ataupun dikerjasamakan.
		3.	Melakukan pendataan Pemanfaatan lahan-lahan yang tidak produktif pada Dinas Pertanian	2.	Mempercepat pembentukan Perda Aneka usaha .
14.	Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP)	1.	Realisasi pendapatan retribusi dari sektor perikanan pada Triwulan III (per Oktober 2025) masih rendah mencapai 63,49% atau Rp 613.905.400,- dari target dalam APBD-P TA 2025 sebesar Rp 967.000.000	2	Pemerintah daerah perlu melakukan kajian potensi dan pengembangan industri dari sektor perikanan sebagai upaya peningkatan pendapatan retribusi
				3	Pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas produksi pabrik es.
		2.	BBI yang belum optimal	1.	Optimalisasi BBI melalui modernisasi penggunaan alat alat yang mendukung optimalisasi produksi beni
15.	Dinas Perdagangan	1.	Target pendapatan dari sektor retribusi Dinas Perdagangan pada APBD-P TA mengalami penurunan 9% menjadi Rp 5.073.559.550,- dan baru tercapai pada triwulan III sebesar 73,8%:	1.	Dinas Perdagangan perlu melakukan perubahan mekanisme pembayaran/ pemungutan retribusi lebih jelas, efektif dan terukur
		2.	Banyak loss di pedagang pasar yang tidak digunakan/ dimanfaatkan sehingga retribusi harian menurun.	1	Pemerintah Daerah perlu mempertimbangkan terkait dengan revisi perda yang mendukung penarikan retribusi loss pasar agar lebih efektif dan efisien.
		3.	Pedagang yang tidak aktif membuka kios/loss tidak mau menyerahkan kios/loss kepada Dinas Perdagangan sehingga menghambat pengelolaan pasar	1	Pemerintah daerah perlu melakukan edukasi dan sosialisasi kepada pedagang agar lebih adaptif terhadap tantangan pasar yang tradisional maupun berkembangnya digitalisasi media (pasar maupun keuangan).
		4.	Kalibrasi timbangan/tera ulang	1	Perlu dilakukan secara optimal untuk melindungi hak konsumen.
16.	Dinas Pariwisata	1	Tingginya tingkat kebocoran menyebabkan capaian pendapatan asli daerah tidak maksimal	1	Melakukan kajian sistem penarikan retribusi yang efektif dan efisien untuk mencegah kebocoran.

				2	Menerbitkan Surat edaran kepada wisatawan untuk membeli tiket retribusi tempat rekreasi dan olah raga pada tempatnya yaitu pada TPR yang sudah disediakan.
				3	Melaksanakan penertiban tepat-tempat pembelian tiket retribusi tempat rekreasi dan olah raga diluar TPR
				4	Menindak tegas oknum/kelompok yang dengan sengaja menjual tiket retribusi tempat rekreasi dan olah raga diluar TPR
		2	Waktu kunjung wisatawan ke kawasan pantai mulai bergeser pada waktu sore hingga pagi (untuk menikmati <i>Sunset</i> dan <i>Sunrise</i>	1	Melakukan evaluasi Perbup dan MOU dengan Kalurahan terkait perubahan pola penarikan retribusi dari dinas dan yang dilaksanakan oleh Kalurahan. Peugas pungut retribusi malam hari harus ada pendampingan dari dinas
				2	Melakukan roling jadwal pemungutan retribusi antara Dinas Pariwisata dengan Kalurahan
				3	Penertiban petugas pungut dari kalurahan agar tidak dobel job (perangkat kalurahana seharusnya
		2	Potensi Peningkatan kunjungan wisatawan ke Gunungkidul dengan telah dibukanya jembatan Pandansimo yng mempersingkat waktu tempuh dari Bantul Ke Gunungkidul, namun di kelok 18 Belum ada Pos Retribusi	1	Perlu dibangun pos retribusi di kelok 18 karena potensi kunjungan wisatawan dari arah bantul ke Gunungkidul lebih tinggi.
17.	DPMPTSP	1	Capaian Pendapatan Asli Daerah sampai dengan Bulan Oktober baru tercapai 62,96%, disebabkan karena dinas tidak memiliki anggaran kegiatan pengawasan, sehingga capaian pendapatan kecil	1	DPMPTSP seharusnya selalu berkoordinasi dengan OPD teknis. Karena DPMPTSP terkait penerbitan PBG
				2	Tugas yang diberikan kepada DPMPTSP semestinya diikuti dukungan anggaran yang mencukupi untuk melaksanakan tugas yang dibebankan yakni pendapatan dari Retribusi PBG, sehingga hasilnya diharapkan lebih optimal.
				3	DPMPTSP perlu melakukan upaya preventif agar tidak terjadi tunggakan retribusi PBG.
18.	DINAS PERHUBUNGAN	1.	Total realisasi pendapatan Dinas Perhubungan mencapai Rp1.410.355.000 atau 67,37% dari target tahunan sebesar Rp2.093.460.000. Total realisasi belanja hingga September 2025 tercatat sebesar Rp18.702.982.627 atau 72,95% dari total anggaran tahun 2025 sebesar Rp25.639.167.842	1.	DPRD merekomendasikan agar Dinas Perhubungan melakukan langkah percepatan pada Triwulan IV Tahun 2025.

		2.	Proses pendataan terkait meterisasi dengan PLN belum terselesaikan	2a	DPRD merekomendasikan Dinas Perhubungan untuk segera berkoordinasi dengan kalurahan terkait pendataan PJU melalui partisipasi masyarakat.
				2b	DPRD mendorong agar Dinas Perhubungan segera memberikan progress yang nyata terkait pendataan PJU mengingat sudah mendekati akhir Tahun Anggaran 2025
19.	DPUPRKP	1.	Total realisasi belanja DPUPRKP baru mencapai Rp35.313.075.451 atau 52,12% dari total anggaran sebesar Rp67,753,216,902. Total realisasi pendapatan hingga September 2025 tercatat sebesar Rp315.894.300 atau 60,05% dari target tahunan sebesar Rp526.025.000	1.	DPRD merekomendasikan agar Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) melakukan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pada Triwulan IV Tahun 2025,
		2.	Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) di beberapa wilayah belum optimal	2.	DPRD merekomendasikan agar DPUPRKP memfokuskan anggaran swakelola untuk pemeliharaan PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)
		3.	Unit hunian di Rusunawa masih banyak yang kosong, sehingga berdampak pada rendahnya capaian pendapatan dari retribusi sewa rumah susun	3.	DPRD merekomendasikan kepada Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman DPUPRKP untuk memperluas kriteria penerima manfaat Rusunawa, sehingga tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), tetapi juga bagi kelompok masyarakat lain yang memiliki kebutuhan mendesak terhadap hunian layak dan terjangkau.
20.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.	Total realisasi belanja Dinas Lingkungan Hidup baru mencapai Rp10.644.290.611 atau 58,50% dari total anggaran sebesar Rp18.196.412.033. Total realisasi pendapatan hingga September 2025 tercatat sebesar Rp880.746.846 atau 82,45% dari target tahunan sebesar Rp1.068.232.100	1.	DPRD merekomendasikan agar Dinas Lingkungan Hidup melakukan langkah percepatan pada Triwulan IV Tahun 2025.
21.	DINAS KESEHATAN	1.	Progres pembangunan fisik belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan, dan masih ditemukan ketidaksesuaian terhadap standar teknis serta kualitas bangunan yang terbangun.	1.	DPRD mendorong agar pembangunan fisik di Dinas Kesehatan selesai sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan dan menjamin pengawasan pembangunan fisik tersebut dilakukan dengan rigid untuk memastikan kesesuaian dengan standar mutu bangunan.
22.	DINAS PENDIDIKAN	1.	Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih memerlukan penyesuaian agar tidak berdampak pada fokus kegiatan belajar mengajar. Kemungkinan pelibatan tenaga pendidik dalam pengawasan distribusi makanan di beberapa sekolah berpotensi mengurangi waktu pembelajaran	1	Perlu pengaturan yang lebih proporsional antara pelaksanaan MBG dan kegiatan belajar mengajar, dengan memperkuat koordinasi antara Badan Gizi Nasional dan Dinas Pendidikan untuk menjaga mutu pembelajaran sekaligus memastikan pelaksanaan MBG berjalan sesuai standar keamanan pangan dan administrasi yang baik

		2.	Kekurangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan masih tinggi, sementara mekanisme redistribusi guru ASN masih berproses.	2	Pemetaan ulang kebutuhan guru berbasis lokasi sekolah dan jarak tempat tinggal, dengan prioritas pada daerah kekurangan tenaga pengajar serta melanjutkan kebijakan regrouping secara bertahap dan partisipatif untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan tenaga pendidik dan sarana belajar.
		3.	Kesejahteraan guru masih perlu mendapat perhatian karena tingkat gaji/honor yang diterima relatif rendah dibandingkan beban tugas dan tanggung jawab yang diemban.	3	Perlu disusun skema penghargaan atau insentif tambahan melalui optimalisasi sumber pendanaan daerah berbasis kinerja guna mendukung motivasi dan peningkatan mutu layanan pendidikan daerah .
		4.	Masih terdapat aset pendidikan seperti perabot sekolah dan sarana penunjang belajar yang tidak lagi terpakai tanpa kejelasan tindak lanjut di beberapa satuan pendidikan karena statusnya yang masih tercatat sebagai aset daerah.	4	Perlu dilakukan penataan dan penertiban data aset pendidikan dengan memperjelas mekanisme penghapusan, pemusnahan, atau pemanfaatan kembali aset rusak sesuai ketentuan pengelolaan barang milik daerah, sehingga tidak menimbulkan penumpukan barang dan tetap mendukung efisiensi pengelolaan sarana pendidikan.
23.	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	1.	Program pengembangan dan pembinaan olahraga telah berjalan dengan baik, namun perlu dipastikan keberlanjutan kegiatan pembinaan atlet pasca perubahan kelembagaan dinas	1	DPRD memberikan apresiasi atas capaian pembinaan dan pelatihan atlet yang telah dilakukan. Fungsi pembinaan dan dukungan terhadap atlet diharapkan tetap dilanjutkan oleh perangkat daerah penerus secara terencana dan berkesinambungan
		2.	Fasilitas olahraga bagi masyarakat, atlet dan pelajar berprestasi masih perlu ditingkatkan agar mendukung pembinaan prestasi secara optimal.	2	Diharapkan pemerintah daerah tetap memberikan perhatian pada peningkatan dan penyediaan fasilitas olahraga yang memadai bagi masyarakat, atlet dan pelajar, sehingga prestasi olahraga Gunungkidul dapat terus berkembang di tingkat regional maupun nasional.
		3.	Beberapa sarana dan prasarana olahraga yang dibangun telah dimanfaatkan masyarakat, namun perlu dijaga keberlanjutannya melalui pemeliharaan rutin dan pengelolaan bersama masyarakat.	3	Diharapkan dilakukan penyerahan dan pengelolaan sarana olahraga secara bertahap kepada perangkat daerah penerus atau lembaga masyarakat dengan dukungan APBD dan CSR untuk menjaga keberlanjutan fungsi fasilitas olahraga.
24.	Urusan Tenaga Kerja Pada Dinas Perindustrian , Koperasi, UMKM Dan Tenaga Kerja	1.	Program pelatihan kerja dan pengembangan tenaga kerja telah berjalan, namun masih memerlukan penguatan agar hasilnya lebih selaras dengan kebutuhan dunia industri dan sektor unggulan daerah	1	DPRD mendorong agar pelaksanaan pelatihan kerja dilengkapi dengan laporan capaian dan evaluasi hasil secara berkala, sehingga dapat menjadi dasar perencanaan pelatihan berikutnya yang lebih tepat sasaran.
		2.	Kegiatan pelatihan perlu lebih diarahkan pada bidang yang memiliki potensi pengembangan ekonomi lokal seperti	2	Disarankan agar jenis dan materi pelatihan disesuaikan dengan karakteristik potensi ekonomi lokal di masing-masing wilayah,

			pariwisata, pengolahan hasil pertanian, dan industri kreatif digital		sehingga lulusan pelatihan dapat lebih mudah terserap di pasar kerja
		3.	Kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga pelatihan masih perlu diperluas untuk memperkuat penyerapan tenaga kerja.	3	DPRD mendorong peningkatan kemitraan dengan dunia usaha dan industri dalam bentuk program magang, pelatihan bersama, serta pemanfaatan sistem informasi pasar kerja daerah untuk mempertemukan lulusan pelatihan dengan kebutuhan riil lapangan kerja
25.	BPJS KESEHATAN CABANG WONOSARI	1.	Penghapusan kepesertaan otomatis pada kelompok masyarakat desil 6–10 menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan layanan kesehatan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah	1	Pemerintah daerah perlu menyusun analisis fiskal khusus serta proyeksi pembiayaan BPJS tahun 2026 agar kebutuhan pendanaan dapat dikelola dengan baik tanpa mengganggu prioritas belanja publik lainnya
		2.	Potensi peningkatan beban pembiayaan BPJS APBD pada tahun 2026 di kisaran 41 Miliar untuk menanggung sekitar 113 ribu peserta BPJS memerlukan perencanaan keuangan yang lebih matang	2	Disarankan pembentukan tim koordinasi lintas perangkat daerah (Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dukcapil, dan BPJS) guna memperkuat sinkronisasi dan validasi data peserta secara berkala termasuk penguatan sosialisasi pada masyarakat mengenai keanggotaan BPJS terbaru.
		3.	Belum terdapat prosedur baku untuk pelayanan darurat bagi peserta BPJS yang berstatus non-aktif, sehingga diperlukan kepastian mekanisme penanganannya.	3	Perlu ditetapkan SOP pelayanan darurat (<i>bypass</i>) di RSUD dan Puskesmas agar masyarakat tetap memperoleh layanan kesehatan dalam kondisi gawat darurat meskipun status kepesertaan sedang dalam proses aktivasi.
26.	DINAS KESEHATAN	1.	Angka Stunting pada Balita Di gunungkidul yang nilainya masih tinggi	1a	Melaksanakan pelatihan teknis bagi tenaga kesehatan dan kader posyandu dalam deteksi dini stunting, tata laksana gizi buruk, serta konseling gizi keluarga.
				1b	Mendorong peran aktif pemerintah desa melalui alokasi Dana Desa untuk kegiatan pencegahan stunting, termasuk pembangunan sanitasi, air bersih, dan pemberdayaan ekonomi keluarga miskin.
		2.	Dua Dapur Sehat di Gunungkidul Ditutup karena Dugaan Keracunan Program Makan Bergizi Gratis	2a	Melakukan sertifikasi laik higiene sanitasi bagi semua dapur atau penyedia makanan sebelum diperbolehkan beroperasi kembali
				2b	Melakukan pengawasan dan Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG, mencakup aspek gizi, keamanan pangan, dan efisiensi pelaksanaan
				2c	Melakukan rehabilitasi dapur sehat yang ditutup setelah memenuhi seluruh persyaratan keamanan pangan.
		3.	Masih kurangnya SDM dokter Jiwa DI Gunungkidul	3a	Melakukan penambahan formasi dokter spesialis jiwa melalui mekanisme rekrutmen ASN, PPPK, atau kerja sama penugasan dari Kementerian Kesehatan

				3b	Meningkatkan fungsi rujukan dari Puskesmas ke RSUD Wonosari dan RS rujukan provinsi dengan koordinasi yang terintegrasi
		4.	Temuan Ratusan Warga Gunungkidul Jadi Penderita TBC	4a	Melakukan skrining aktif di masyarakat terutama di wilayah dengan angka kasus tinggi.
				4b	Memastikan semua penderita TBC memperoleh pengobatan lengkap dan terpantau
				4c	Edukasi masyarakat secara masif tentang gejala TBC, cara penularan, dan pentingnya pemeriksaan dini melalui penyuluhan di posyandu, sekolah, tempat ibadah, dan media lokal
27.	DINAS KEBUDAYAA N (KUNDHA KABUDAYAN)	1.	Anggaran kegiatan kebudayaan (Dana Keistimewaan)berkurang dan pemangkasan kegiatan festival berjenjang	1a	Menjalin komunikasi dengan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY dan Paniradya Kaistimewan DIY.
				1b	Mencari dukungan dana dari sumber lain seperti Dana Alokasi Khusus Non Fisik Taman Budaya
				1c	Mengoptimalkan kegiatan festival Kabupaten sebagai sarana peningkatan potensi serta pelestarian seni budaya
		2.	Pelestarian Warisan budaya dan cagar budaya yang belum optimal	2	Pelestarian warisan budaya dan cagar budaya dioptimalkan, misal program wajib kunjung museum kuota ditambah
		3.	Kegiatan Kebudayaan tradisional belum terakomodir	3	Pembinaan Kalurahan Kantong Budaya menjadi Rintisan Kalurahan Budaya dan Rintisan Kalurahan Budaya menjadi Kalurahan Budaya.
		4.	Terbatasnya anggaran pendukung kegiatan kebudayaan di Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	4	Peningkatan anggaran untuk mendukung kegiatan kebudayaan Dinas Kebudayaan
		5.	Belum optimalnya penggunaan Taman Budaya Gunungkidul	5	Pengoptimalan Taman Budaya Gunungkidul sebagai media ekspresi seniman dan warga masyarakat Gunungkidul misal promosi event bekerjasama dengan biro wisata
28.	DINAS PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DAN KALURAHAN, PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.	Peminat metode kontrasepsi jangka panjang MOP MOW lebih sedikit daripada metode kontrasepsi jangka pendek.	1	Memberikan edukasi kepada masyarakat melalui pengoptimalan kelompok masyarakat seperti posyandu, kelompok bina keluarga, KWT, kelompok non formal di padukuhan (arisan RT bapak - bapak).
		2.	Kelompok kegiatan bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia belum merata di setiap desa dan anggaran untuk kegiatan kelompok tersebut masih minim karena tergantung dari Dana DAK Pusat.	2a	Kerjasama dengan kalurahan melalui pemberdayaan kelompok masyarakat, misal PKK, Karang Taruna

				2b	Mendorong pemerintah kalurahan untuk dapat menganggarkan pembiayaan terkait kelompok bina - bina tersebut.
29.	DINAS SOSIAL , PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.	Penanganan ODGJ masih sangat minim dan terbatas.	1a	Menambah jumlah fasilitas untuk penanganan ODGJ, termasuk kamar.
				1b	Kerjasama dengan rumah sakit jiwa untuk tindakan lebih lanjut bagi ODGJ
		2.	Penambahan jumlah pembekuan BPJS PBI oleh pemerintah pusat total sebanyak 24.000 jiwa	2a	Prioritas bagi pasien yang mempunyai penyakit katastropik dalam penyisiran untuk megcover jaminan bagi penerima bantuan yang layak
		3.	Penyaluran bantuan sosial masih ditemui kasus tidak tepat sasaran	3a	Berkoordinasi dengan pihak Kalurahan terkait pemutakhiran data penerima bantuan sosial.
				3b	Melakukan ground check ke lapangan.
				3c	Melakukan reaktivasi jalur formal melalui RT/RW, Kalurahan, Dinas Sosial, dan Pengesahan Kepala Daerah
				3d	Sosialisasi kepada masyarakat terkait reaktivasi jalur partisipatif melalui akses aplikasi Cek Bansos, yang memungkinkan usulan atau sanggahan secara mandiri
30.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1.	Masih minimnya koleksi digital perpustakaan online di Gunungkidul	1	Menambah koleksi digital di aplikasi e Pusda Gunungkidul

Wonosari, 17 Oktober 2025

Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul,



Endang Sri Sumiyartini

Dra. Endang Sri Sumiyartini, M.A.P.